



DIPLOMASI PARLEMEN: ISU INTERNASIONAL YANG MENJADI PERHATIAN DPR RI

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang 12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

- 1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**DIPLOMASI PARLEMEN:
ISU INTERNASIONAL
YANG MENJADI
PERHATIAN DPR RI**

Oleh:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023

**DIPLOMASI PARLEMEN: ISU INTERNASIONAL YANG MENJADI PERHATIAN
DPR RI | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Pusat
Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2023**

viii + 106 hlm; 14,5 X 21 cm

ISBN: 978-623-141-113-6

Cetak Pertama, 2023

Judul: Diplomasi Parlemen: Isu Internasional Yang Menjadi Perhatian DPR RI

Penulis: Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

Tata letak isi: Septia

Desainer cover: Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

copyrights © 2023

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis Keparlemenan

Badan Keahlian Setjen DPR RI

Gedung Nusantara 1 Lt. 2.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Penerbit Omera Pustaka, Anggota IKAPI Jawa Tengah

Kauman, Ajibarang Kulon, Ajibarang,

Banyumas, Jawa Tengah 53163

omeracreative@gmail.com

<https://omerapustaka.com>

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, buku yang ditulis oleh Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama, dengan judul “Diplomasi Parlemen: Isu Internasional yang Menjadi Perhatian DPR RI” berhasil diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah buku yang telah ditulis oleh para Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku yang menganalisis peran diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis selaku Analis Legislatif yang memiliki tugas memberikan dukungan keahlian, antara lain, melalui penyajian tulisan hasil analisis untuk digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan peran yang dimiliki oleh DPR RI. Kehadiran buku ini semakin penting

di tengah terbatasnya informasi yang dimiliki oleh publik perihal peran diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI di forum internasional, khususnya forum antarparlemen.

Keterlibatan penulis sebagai salah satu penyusun buku laporan kinerja DPR RI untuk bidang diplomasi parlemen, dan perhatian penulis selama ini terhadap pelaksanaan peran diplomasi DPR RI, menjadikan buku ringkas yang menyajikan perihal diplomasi parlemen dengan sejumlah isu internasional yang menjadi perhatian DPR RI ini, menarik dan layak untuk dibaca. Setidaknya tulisan yang tersaji dalam buku ini menjadi bahan informasi tambahan bagi yang berminat pada isu diplomasi parlemen.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada penulis buku yang penting dan menarik ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari penulis, sebagai Analis Legislatif yang memiliki tugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, dapat terwujud melalui penerbitan buku ini. Lebih dari itu, saya mengharapkan buku ini bermanfaat bagi DPR RI.

Jakarta, September 2023

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR --- v

DAFTAR ISI --- vii

BAB 1 PENDAHULUAN --- 1

BAB 2 ISU INTERNASIONAL YANG MENJADI PERHATIAN
DPR RI PADA TAHUN SIDANG 2021–2022 --- 9

BAB 3 ISU INTERNASIONAL YANG MENJADI PERHATIAN
DPR RI PADA TAHUN SIDANG 2022–2023 --- 29

BAB 4 STABILITAS KAWASAN ASIA PASIFIK: SITUASI
KEAMANAN DI SEMENANJUNG KOREA DAN LAUT
CHINA SELATAN --- 49

BAB 5 ASEAN, AIPA DAN STABILITAS KAWASAN ASIA
TENGGARA --- 65

BAB 6 PENUTUP --- 79

DAFTAR PUSTAKA --- 85

INDEKS --- 98

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS --- 105

INDEKS

A

- AIPA 6, 8, 11, 22, 24-25, 36,
45-47, 52, 61-62,
65, 67, 73, 76-78,
81-83
- Al-Aqsa 43-45
- Amerika Serikat 50, 70, 72
- Annual Parliamentary
Hearing at the
United Nations 37
- APPF 6, 11, 15, 19, 20, 22, 31-
33, 37, 56, 82,
- APSC 68, 69
- AS 50, 54-55, 57, 59, 71-72
- ASEAN 6, 8, 22, 24,-26, 36,
45, 47, 50, 52, 57,
60- 62, 65-78, 81-
83
- ASEAN Agreement on
Electronic
Commerce 22
- ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly 6, 52, 66
- ASEAN Outlook on the Indo-
Pacific 75
- ASEAN Plus Three Menteri
Luar Negeri 66, 73
- ASEAN Political Security
Community 68

Asian Parliamentary
 Assembly 6

Asia Pacific Parliamentary
 Forum 5, 19, 31, 56

ASIA PASIFIK 49

Asia Tenggara 8, 21, 59, 62,
 65-69, 72-73, 76,
 82, 83

aukus 95

B

Badan Kerja Sama Antar-
 Parlemen 16

BKSAP 15-16, 20-23, 25, 31,
 34, 40, 42-44, 46,
 57, 86-88

Buku Putih Ekonomi Hijau
 16

C

carbon net sink FOLU 16

claimant states 58

CoC 60, 74

Code of Conduct 60, 74

Committee Representing
 Pyidaungsu
 Hluttaw 25

Conference of the State
 Parties to the
 United Nations
 Convention against
 Corruption 22

COP26 14, 15

COP27 33, 86

CoSP–UNCAC 22, 23

CRPH 25

D

Deklarasi ASEAN 1967 67

Deklarasi Nusa Dua 16, 17

- E**
- Ekonomi Digital 20
 - ekonomi hijau 14, 16, 35-37, 42, 80
 - emergency item 11, 26-27, 30
- F**
- Fadli Zon 21, 23, 25, 27, 31, 40, 42-44, 46
 - Five-Point Consensus 25, 45
- G**
- GKSB 57
 - Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 6, 22
 - GOPAC 6, 22-24, 41-42
 - Green Economy White Paper 16
 - Grup Kerja Sama Bilateral 57
- H**
- hak rakyat atas air bersih 37
- I**
- ICBM 53
 - Indo-Pasifik 65, 73
 - intercontinental ballistic missile 53
 - Inter-Parliamentary Union 4, 13, 17
 - IPU 4-5, 11, 13, 16-20, 26-27, 30-31, 37, 81
 - IPU Task Force 31, 81
 - Israel 43-44, 81
- J**
- Joint Communique AMM 74

- K**
- Kawasan Bebas Senjata
 - Nuklir Asia
 - Tenggara 69
 - keamanan siber 40, 41
 - kepemimpinan perempuan
 - 20, 39, 40, 80
 - kesetaraan gender 17, 19, 20
 - Kim Jong Un 53, 93
 - Komunitas Politik Keamanan
 - ASEAN 68, 82
 - Konsensus Lima Poin 75, 77
 - konstruktivisme 51, 66
 - Konvensi PBB tentang
 - Hukum Laut 61
 - Korea Selatan 15, 19, 22, 50,
53-56, 57, 66
 - Korea Utara 32, 50, 53-55,
56, 57, 71
 - krisis Myanmar 25, 45-47, 65,
69, 71, 75
- L**
- Labuan Bajo 71
 - Laut China Selatan 8, 50,
52, 57, 65, 69, 70,
81-82
 - LCS 57-62, 70, 74
 - Liga Parlemen untuk Al-Quds
43, 44
- M**
- Mahkamah Arbitrase PBB 61
 - Menlu Retno 73
 - MIKTA 6, 11
 - multilateralisme 33-34, 66,
80
 - multi-track diplomacy 2, 52,
82

- N**
- Net Zero Emission 16
- Nick Bisley 59
- Nine Dash Line 58
- no one left behind 12
- O**
- observer 61, 77, 78, 83
- P**
- P20 6, 37
- palestina 90, 94
- pandemi Covid-19 11-13,
18, 26
- Parliamentary Union of the
OIC Member States
5
- peak emission 15
- pembangunan
berkelanjutan 35-
37, 76, 80
- pemberantasan korupsi 23,
41, 43
- pemberdayaan perempuan
17-18, 20
- Pembukaan UUD NRI 1945
63
- perubahan iklim 14-15, 17,
33-35, 80
- Pre-COP26 Parliamentary
Meeting 14
- Puan Maharani 18, 27, 39, 76
- PUIC 5, 44
- R**
- Retno LP Marsudi 66
- rivalitas AS–China 59, 72
- Rusia 27, 30-31, 77, 81
- S**
- SDGs 12-14, 35, 76, 80-81
- SEANWFZ 69, 82

seapac 89
 Selat Taiwan 69, 71-72
 Semenanjung Korea 8, 50,
 52-57, 69, 71, 81-82
 Southeast Asian
 Parliamentarian
 Against Corruption
 41
T
 TAC 69, 74, 78, 82
 the First Global
 Parliamentary
 Meeting on
 Achieving the
 SDGs 13
 The League of
 Parliamentarian for
 Al-Quds 43
 Thomas Andrews 46
 Track 1½ Diplomacy 90
 track one diplomacy 3
 track two diplomacy 4, 52
 Treaty of Amity and
 Cooperation in
 Southeast Asia 69,
 74, 78
 tujuan pembangunan
 berkelanjutan 35,
 76, 80
U
 Ukraina 27, 30-31, 81
 UNCLOS 1982 61, 75
 Undang-Undang MD3 6
 United Nation World Tourism
 Organization 18
 UN Special Rapporteur on
 the situation of
 human rights in
 Myanmar 46
 UNWTO 18

W

Wang Yi 70

Y

Yerusalem Timur 26, 43-44

Yoon Suk-yeol 54

Z

Zone of Peace, Freedom and
Neutrality 68

ZOPFAN 68-69, 82

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Simela Victor Muhamad, Drs, M.Si., adalah Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain, adalah: “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina–Israel” (artikel dalam *Jurnal Politica*, Vol. 8, No. 1, Mei 2017); “Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan” (dalam buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); “Proxy War dalam Konflik di Lebanon” (dalam buku *Proxy War di Timur Tengah*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019); “Keamanan Maritim dan Urgensi Kehadiran Bakamla dalam Pengamanan Wilayah Perairan Indonesia” (dalam buku *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

